

ABSTRAK

INDEPENDENSI FUNGSI PENGAWASAN MEDIA MASSA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Radar Lampung Media Grup)

Oleh

Seftia Zeudiswara Simangunsong

Media massa sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Radar Lampung Media Grup sebagai media lokal di Lampung, menjalankan fungsi tersebut melalui pemberitaan terkait kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dengan mekanisme editorial berlapis dan menjaga akurasi informasi sebagai bagian dari penyajian informasi yang bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi fungsi pengawasan Radar Lampung Media Grup terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori independensi media oleh Denis McQuail (1992) yang meliputi keberadaan opini, ketiadaan personalisasi, ketiadaan sensasionalisme, ketiadaan stereotip, ketiadaan juxtaposition (penyandingan) dan linkage (pengaitan), serta akurasi dalam pemberitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi fungsi pengawasan Radar Lampung belum diimplementasikan secara optimal pada indikator ketiadaan personalisasi dan ketiadaan sensasionalisme, yang ditandai oleh kecenderungan pemberitaan bersifat informatif dan belum mendalami serta menindaklanjuti isu secara kritis, sehingga fungsi pengawasan masih bersifat informatif dan belum sepenuhnya evaluatif dalam mendorong akuntabilitas pemerintah provinsi.

Kata Kunci: Independensi Media, Fungsi Pengawasan, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Radar Lampung Media Grup

ABSTRACT

THE INDEPENDENCE OF MASS MEDIA OVERSIGHT FUNCTION ON THE ACCOUNTABILITY OF THE LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT'S PERFORMANCE (A Study at Radar Lampung Media Group)

By

Seftia Zeudiswara Simangunsong

The Mass media, as the fourth pillar of democracy, plays a crucial role in overseeing government administration as stipulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. Radar Lampung Media Group, as a local media outlet in Lampung, carries out this function through reporting on the performance of the Lampung Provincial Government by implementing a multi-layered editorial mechanism and maintaining the accuracy of information as part of responsible journalism. This study aims to analyze the independence of the supervisory function of Radar Lampung Media Group in relation to the accountability of the Lampung Provincial Government's performance. It employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The data analysis refers to Denis McQuail's (1992) theory of media independence, which includes the presence of opinion, the absence of personalization, the absence of sensationalism, the absence of stereotyping, the absence of juxtaposition and linkage, as well as accuracy in reporting. The findings indicate that the independence of Radar Lampung's supervisory function has not been optimally implemented, particularly in the aspects of the absence of personalization and sensationalism. This is reflected in the tendency of the news coverage to remain primarily informative, lacking deeper exploration and critical follow-up of issues. As a result, the supervisory function tends to be informative rather than fully evaluative in promoting the accountability of the provincial government.

Keywords: *Media Independence, Oversight Function, Regional Government Accountability, Radar Lampung Media Group*